

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DI KOTA BATAM

Diana Wahyuniati¹, Azhar Abbas²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

email: dianawahyuniati.dw@gmail.com

ABSTRACT

Poverty is one of the problems facing the city of Batam. Where the poverty reduction strategies that have been implemented by the Social Service and Community Empowerment of Batam City so far have not been effective in reducing the amount of poverty that exists. One of the programs carried out by the Batam city government is Non-Cash Food Assistance and Uninhabitable Home Rehab. In connection with the problem under study, that is to find out alternative strategies that can be used by the government to tackle poverty in Batam. The method used is a SWOT analysis in which to find out what are the strengths, weaknesses, oppurtunities, and threats of the Batam city poverty reduction strategy through structured interviews with questions prepared earlier. As the informant, namely the section head for handling the poor, the Social and Empowerment Office and the community receiving social assistance. The results of the study prove that poverty reduction strategies implemented by the Office of Social and Community Empowerment have not been able to reduce poverty. This is because the program is only to help meet the basic needs of the poor. Based on the results of research suggestions for the Social Service and Community Empowerment as an agency that handles poverty issues, to create programs that encourage the productivity of the poor so they can move from poverty.

Keywords: Poverty, Strategy, Programs, SWOT

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi atau diperlukan solusi yang menyeluruh untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu perlu diketahui akar masalah yang sebenarnya terjadi di masyarakat miskin. Di Indonesia tingkat kemiskinan cukup tinggi baik di pedesaan maupun diperkotaan. Menurut Bank Dunia kemiskinan pedesaan di Indonesia jumlahnya cukup besar dari nilai absolut maupun tingkat (ratio) kemiskinan. Kemiskinan di pedesaan dikarenakan keterbatasan mengakses pekerjaan yang layak, kesehatan, pasar, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan di tingkat perkotaan (Mengulas kemiskinan di desa, 2019).

Walaupun tingkat kemiskinan di perkotaan lebih sedikit dibanding pedesaan tetapi masalah yang dihadapi lebih kompleks. Masalah kemiskinan jauh lebih kompleks

karena tidak hanya menyangkut soal pekerjaan, pendapatan, perumahan, pendidikan, namun berkaitan pula dengan masalah sosial yang bersifat phatologis seperti keturunan sosial, kerentanan terhadap kriminalitas, kekerasan, dll.

Untuk mengukur suatu kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan menggunakan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan/ tidak terpenuhinya sesuatu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran saja. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

jumlah penduduk miskin Kepulauan Riau mengalami fluktuasi naik dan turun tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 125,36 jiwa, lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 127,76 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Jumlah kemiskinan di kepri didominasi oleh masalah ketenagakerjaan terutama di perkotaan dimana perkembangan ekonomi di kepri tergantung pada sektor industri dimana kenaikan jumlah penduduk miskin di kepri akibat meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan.

Begitu pula halnya dengan jumlah penduduk miskin di kota Batam juga cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 penduduk miskin sebanyak 6,16 ribu jiwa, kemudian naik dengan signifikan sebanyak 67,41 ribu jiwa pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 turun menjadi sebanyak 66,21 ribu jiwa. Salah satu penyebab kemiskinan di kota Batam adalah banyaknya jumlah pendatang dari penjuru daerah lain seperti Jawa dan Sumatera yang masuk ke kota Batam dan menggantungkan hidup. Laju pertumbuhan penduduk kota Batam memang cukup tinggi menurut BPS kota Batam pertumbuhan penduduk di Batam pada tahun 2019 sebanyak 1.376.009 jiwa, jumlah ini mengingkat dibanding jumlah penduduk tahun 2018 yaitu sebesar 1.329.773 jiwa atau bertambah 234.193 jiwa dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk lima tahun yang lalu (BPS kota Batam, 2019).

Dengan membludaknya pendatang tanpa disertai keterampilan yang mumpuni menambah masalah bagi kota Batam dimana jumlah pengangguran mengingkat hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya para pencari kerja dari luar Batam. Selain itu persaingan kerja di Kota Batam terus mengalami peningkatan. Minimnya lapangan pekerjaan membuat angka pencari kerja tidak pernah turun. Sebanyak 604.831 orang merupakan angkatan kerja, dari jumlah angkatan kerja itu penduduk yang bekerja sebanyak 550.813 jiwa dan yang belum terserap atau pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 54.018 jiwa. Jumlah pengangguran tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,93 persen atau sebanyak 6.654 orang dibanding jumlah

mulai dari tahun 2017 jumlah penduduk miskin kepri 128,43 jiwa, kemudian pada pengangguran tahun 2017 lalu (BPS kota Batam, 2020)

Walaupun sudah banyak program yang pemerintah laksanakan guna membantu penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya maupun program yang memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki kapabilitas untuk memiliki pendapatan dengan mandiri sehingga dengan seiringnya waktu pemerintah berharap orang miskin bisa keluar dari kondisi kemiskinannya, namun hasil yang diekspektasikan masih jauh. Hal ini terlihat dari masih konsisten jumlah penduduk miskin di Kota Batam yang naik turun atau fluktuatif. Hal ini membuktikan tingginya jumlah penduduk miskin yang sudah tersentuh program bantuan kemiskinan tetapi masih sama saja atau tidak berubah karena tidak beranjak dari kondisi miskin dimana bisa dikatakan bahwa kebijakan dan program yang sudah ada masih belum sepenuhnya optimal

Strategi yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan masih saja berorientasi pada aspek ekonomi dimana akan terus mengalami kegagalan, hal tersebut terjadi karena masalah pengentasan kemiskinan hanya dilihat dari dalam aspek ekonomi dimana tidak mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya terjadi saat ini. Penyebab permasalahan kemiskinan yang ada di kota Batam dapat di golongkan menjadi 2 kategori, yang pertama yaitu kemiskinan absolut ialah kemiskinan yang mendera individu atau kolektif yang penghasilannya ada dibawah taraf kelayakan atau dibawah garis kemiskinan. Yang kedua, yang kedua yaitu kemiskinan relatif ialah keadaan dimana suatu kebijakan yang bisa menimbulkan adanya kesenjangan penghasilan dan takaran kesejahteraan yang akan berujung pada banyaknya pengangguran karena lapangan pekerjaan yang tersedia kurang atau tidak memadai.

Oleh sebab itu perlunya strategi kebijakan yang tepat untuk menangani masalah kemiskinan dan harus menetapkan dampak yang diharapkan dari implementasi strategi kebijakan tersebut. Berlandaskan

latar belakang yang sudah diutarakan, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian mengenai kemiskinan dengan mengangkat judul **“Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam”**

Kajian Pustaka

2.1 Manajemen strategis

Banyak definisi manajemen strategis yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya yang dikatakan oleh j.David Hunger dan Thomas L. Wheelen dalam (Novianto Efri, 2019) mendefinisikan manajemen strategis merupakan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang ditujukan oleh kinerja organisasi untuk jangka panjang. Definisi tersebut menunjukkan bahwa dalam manajemen strategis keputusan dan tindakanyang akan dilakukan tidak tunggal atau terdiri dari banyak pilihan-pilihan keputusan dan tindakan, sedangkan tujuan dari keputusan dan tindakan tersebut untuk kinerja organisasi untuk jangka waktu yang panjang bisa satu ,dua , atau lima tahun selanjutnya

2.2 Kemiskinan

Menurut Sholeh (2010) Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukan aspek sosial dan moral (khomsan ali, 2015). Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan

lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

2.3 Analisis SWOT

Teknik analisis SWOT biasanya digunakan dalam penyusunan sebuah dokumen perencanaan, khususnya untuk membuat Rencana Strategis atau (Renstra). Teknik perencanaan ini menghasilkan suatu strategi pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan potensi yang ada dan dimiliki dari daerah atau institusi bersangkutan. Di samping itu, dengan menggunakan teknik analisis SWOT dapat manghasilkan program dan kegiatan yang lebih tepat untuk merebut peluang dari luar untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi dari dalam. Dengan penggunaan analisis SWOT tentu akan mewujudkan analisis strategi yang lebih konkrit dan realistis yang sesuai dengan kondisi atau situasi milik daerah atau institusi bersangkutan. Tidak heran jika teknik analisis SWOT menjadi sangat populer dikalangan aparatur pemerintah, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, dimana dapat digunakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan.

Analisis SWOT dasarnya merupakan cara atau teknik untuk mengidentifikasi berbagai faktor dan juga unsur penentu pembangunan di dalam suatu institusi yang secara sistematis. Dimana teknik analisis SWOT bertujuan untuk mengevaluasi suatu kondisi lingkup kegiatan yang kemudian dapat digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan institusi yang lebih tepat dan juga sesuai dengan kondisi dan potensi institusi tersebut. Di dalam penerapannya, institusi yang dimaksud adalah yang berbentuk perusahaan, organisasi dan instansi pemerintah. Analisis SWOT berdasarkan kondisi umum institusi yang bersangkutan baik dari yang bersifat eksternal maupun sifat internal dimana untuk mencapai tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pemimpin dan juga para pemangku kepentingan. Istilah SWOT merupakan singkatan dari empat kata, yaitu: Strength (kekuatan), Weaknesses atau kelemahan, Opportunities atau peluang,dan Threat atau ancaman. Keempat aspek penting ini perlu dibahas dimana untuk mengetahui kondisi

dan juga permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah atau institusi tertentu.

Seperti dikutip dalam (Fahmi, 2015:265) ada beberapa strategi yang bisa didapat dan digunakan dari teknik Analisis SWOT sebagai berikut:

1. Strategi SO (*Strength-Opportunities*) yaitu strategi dengan cara memanfaatkan kekuatan atau kelebihan yang ada dalam institusi untuk bisa mendapatkan kesempatan/menentukan perpaduan kekuatan dan peluang yang bisa mempergunakan kekuatan yang ada untuk mendapatkan strategi dengan memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya.
2. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*) yaitu strategi dengan cara mengurangi kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada institusi itu sendiri yang kemudian digunakan untuk bisa merebut kesempatan yang terdapat di lingkungan luar atau eksternal dengan memanfaatkan kesempatan yang bisa memberi keuntungan.
3. Strategi ST (*Strength-Threat*) ialah strategi yang memberdayakan kekuatan atau kelebihan yang berasal dari dalam institusi dimana digunakan untuk menenyapkan ancaman dari luar atau menghadapi ancaman yang berasal dari luar instansi tersebut.
4. Strategi WT (*Weakness-Threat*) ialah strategi dengan cara menghadapi kelemahan yang terletak di internal atau institusi itu sendiri untuk mengecilkan kelemahan yang ada guna menyingkir dari ancaman yang akan datang berasal dari eksternal atau dari luar instansi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Satibi dan Undang Sudrajat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Volume 9, No 2 (2019) P-ISSN: 2303-3169, E-ISSN: 2579-3098 yang berjudul Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia Kota Tasikmalaya dengan

menggunakan model benchmarking. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, sudah belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk merampingkan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang mengacu pada hasil benchmarking. Hasilnya mencakup dua hal utama, yaitu kebutuhan akan kemauan politik daerah kepala dan pembentukan lembaga khusus yang menangani kemiskinan (Satibi Iwan, 2019)

Volume 15 No.2 Tahun 2012, ISSN: 1693-8186, E-ISSN: 2407-1633, Putriana dengan judul Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana salah satu pada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi atau dari pemerintahan suatu daerah ialah miskin yang pada dasarnya dikurangi ialah pembangunan untuk melakukan peningkatan kemakmuran masyarakat secara adil dan selaras. Pengembangan tujuan ini sangat terkait erat dengan usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan penghasilan. Kemiskinan di Provinsi Riau ialah salah satu masalah yang dihadapi dalam berhasilnya pembangunan jika dilihat dari sisi yang muncul ekonomi karena ketidaksetaraan dalam hal memiliki sumber daya yang menciptakan kesetaraan dalam distribusi penghasilan, kualitas sumber daya manusia yang berbeda, dan berbedanya akses pada modal dan pekerjaan disana yang rendah. Usaha telah dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan dengan mempromosikan pemberdayaan ekonomi orang melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM). UKM memiliki peran strategis di tingkat nasional dalam membangun ekonomi yang dapat meningkatkan perkembangan ekonomi, lapangan pekerjaan dan penyaluran hasil pembangunan. Peran yang sangat krusial dapat dilihat dari perspektif pekerjaan dan penghasilan bagi kaum miskin, distribusi pendapatan, pengurangan pepatah dan pembangunan ekonomi. Tujuan utamanya ialah pemberdayaan UKM untuk

meningkatkan produktivitas UKM, mempromosikan efektivitas program dan kegiatan terkait pemberdayaan UKM. Pemberdayaan dan pengembangan UKM dalam menanggulangi kemiskinan ialah memberi akses kepada orang miskin untuk bisa turut serta dalam bisnis dan aktif dalam kegiatan bisnis yang produktif dan mempromosikan kewirausahaan, terutama diantara daerah miskin atau tertinggal. (Putriana, 2012)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang ada pada penelitian kali ini adalah jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang ada saat dilapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial. Peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung ke lapangan dan dokumentasi berupa foto. Peneliti melakukan analisis data dengan reduksi data terhadap data yang diperoleh peneliti saat dilapangan. Sedangkan pengumpulan data disajikan dengan rapi dan terstruktur sehingga dapat mudah dipahami. Serta dilakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

4.1 Program Bantuan Sosial pada Dinsos-PM

1. BPNT merupakan Program ini merupakan salah satu program bantuan untuk memenuhi pangan yang sesuai taraf umum atau layak dan dilakukan dengan menukar kartu elektronik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membeli beras dan bahan pangan lain sesuai dengan sejumlah uang yang diberikan
2. RTLH merupakan kegiatan bantuan perbaikan/pemulihan rumah yang dilakukan terhadap rumah yang dimiliki rumah tangga miskin yang artinya program ini diperuntukkan bagi yang sudah berkeluarga.

4.2 Indikator Penelitian dengan menggunakan teknik analisis SWOT

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan atau strenght adalah sebuah kelebihan yang ada pada instansi misalnya memiliki sumber daya manusia yang handal atau memiliki program andalan yang dapat membuat i instansi tersebut menjadi kuat atau memiliki kelebihan dibanding dengan instansi lain seperti suatu mekanisme penyaluran bantuan dan prosedur administasi yang mudah sehingga penerima bantuan dapat melengkapi prosedur dengan mudah kemudian sarana dan prasaran penunjang dalam melaksanakan penyaluran sehingga bantuan sosial dengan mudah didapatkan oleh penerima bantuan sosial tersebut. Dimana KPM hanya perlu membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada saat akan mengambil bantuan di e-warung terdekat. Hal ini tentu saja sangat mempermudah penyalur bantuan karena petugas penyalur bantuan hanya cukup menunggu di e-warung yang sudah sebab diseluruh kecamatan dan keluarahan se-kota batam dan kemudian saat pemberitahuan bantuan sudah bisa didapat KPM langsung menuju lokasi e-warung terdekat dengan rumahnya.aikan masalah dengan mudah dibanding dengan para pesaing atau instansi lainnya.

Sedangkan kekuatan atau kelebihan dari program RTLH adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial dimana mengembalikan kembali jiwa gotong royong dan kesetiakawanan sosial masyarakat dan juga untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin melalui perbaikan pada rumah dan juga sarana/prasarana lingkungan. Sehingga dapat tercipta perumahan yang layak dan mampu meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan rehab rumah.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan atau bisa juga dikatakan kekurangan dari suatu institusi atau daerah dibandingkan dengan lainnya, misalnya seperti yang dilakukan oleh strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan atau mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Batam dengan adanya program bantuan pangan non tunai

(BPNT) yang memiliki kelemahan indikator penentu penerima bantaun sosial misalnya Program BPNT merupakan program milik pusat atau Kementerian Sosial (KEMENSOS) sehingga daerah sifatnya hanya sebagai tangan kedua atau penyalur bantuan dari KEMENSOS. Dinas sosial hanya menginput data KPM ke basis data terpadu program penanganan fakir miskin dan pusat lah yang memverifikasi data tersebut atau yang menentukan siapa saja yang berhak mendapat bantuan. Sehingga bantuan tersebut bisa menjadi tidak tepat sasaran, karena mungkin saja saat didata KPM memang miskin namun dengan berjalannya waktu KPM tersebut beranjak dari kemiskinan atau bisa dikatakan sudah memiliki kehidupan yang lebih layak, yang harusnya KPM tersebut sudah tidak berhak mendapat bantuan lagi tetapi kare data KPM tersebut sudah terverifikasi oleh pusat makan KPM tersebut masih terus mendapatkan bantuan sehingga bantuan BPNT tidak tepat sasaran.

Sedangkan untuk kelemahan/kekurangan dari Bantuan RTLH adalah Anggaran dimana tidak sedikit jumlah dana yang terima oleh penerima bantuan, setiap penerima bantuan RTLH yaitu sejumlah Rp. 25.000.000,- /orang yang merupakan jumlah bantuan sosial yang paling di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun anggaran yang digunakan untuk progam RTLH ini berasal dari APBD Kota Batam oleh sebab itu disetiap tahunnya tidaklah banyak yang beruntung mendapatkan bantuan Rehab Rumah ini dikarenakan kurangnya anggaran untuk program RTLH ini

C. Peluang (Oppurtunities)

Peluang adalah keuntungan atau kesempatan yang ada dari luar instansi guna memanfaatkan suatu usaha untuk mendorong institusi yang bersangkutan bisa mencapai tujuannya. Adapun peluang atau keuntungan dari program BPNT adalah meningkatkan kehidupan dari segi ekonomi dimana kebutuhan pangannya terbantu oleh pemerintah. Dan bisa membantu dari segi finansial sehingga pengeluaran untuk membeli bahan pangan bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain, sehingga dengan berjalannya waktu KPM mampu keluar dari

lingkar kemiskinan sehingga tujuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai visi misi nya dapat tercapai yaitu dengan adanya program BPNT orang miskin di Kota Batam dapat berkurang. Sedangkan peluang atau keuntungan dari program Rehab RTLH adalah penerima terbantu untuk memperbaiki rumah nya yang sudah tidak layak huni dimana bantuan RTLH sangat membantu di segi finansial bagi masyarakat yang tidak mampu memperbaiki rumah nya dan peluang atau keuntungan lainnya adalah bagi penerima bantuan RTLH mampu meningkatkan kehidupannya dan kepercayaan dirinya sehingga dengan seiring waktu penerima bantuan perlahan mulai bisa memenuhi kebutuh di segi ekonomi dan yang lain sehingga orang tersebut beranjak dari kemiskinan dan hidup dengan layak

D. Ancaman (Threats)

Ancaman bisa dikatakan kondisi atau permasalahan yang datang dari luar yang dapat menimbulkan kendala atau tantangan bagi suatu daerah atau instansi tertentu. Begitu pula dengan 2 program Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Batam. seperti pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana kendala atau permasalahan yang dihadapi ada pada pengawasan kepada penerima bantuan dimana KPM yang sudah beranjak dari kemiskinannya atau seharusnya sudah tidak berhak mendapatkan bantuan BPNT masih tetap saja mendapatkan bantuan. Dimana harusnya KPM yang merasa dirinya sudah tidak boleh mendapatkan bantuan BPNT sesuai kategori yang sudah ditentukan oleh pusat harus melaporkan kepada pendamping kecamatan atau langsung datang ke Dinas terkait untuk menyatakan bahwa dirinya sudah tidak berhak mendapatkan bantuan BPNT. Jika hal tersebut terus terjadi maka tujuan dari program BPNT untuk membantu masyarakat miskin tidak akan tercapai karena bantuan tersebut banyak yang tidak tepat sasaran.

Sedangkan kendala atau permasalahan dari luar yang ada pada program RTLH adalah adanya kecemburuan sosial di masyarakat dimana dalam satu kecamatan

ada puluhan rumah warga yang dimasukkan ke dalam sasaran penerimaan bantuan RTLH namun pada akhirnya dalam satu kecamatan hanya 2 orang saja yang menerima bantuan RTLH. Setiap wilayah per kecamatan berhak mengajukan nama masyarakatnya yang sekiranya berhak mendapatkan bantuan Rehab RTLH yang sebelumnya ditinjau langsung rumah calon penerima dengan kriteria yang sudah ditentukan dan dibantu oleh Kelurahan dan Perangkat RT, RW dan Tokoh Masyarakat yang kemudian akan diajukan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan menggunakan analisis SWOT maka dapat diketahui faktor-faktor mana

saja yang dapat ditetapkan pada isu-isu strategi utama yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan dalam strategi penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan matrik SWOT. Sebelum membuat matrik SWOT peneliti akan mengelompokkan beberapa faktor dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Batam yaitu dengan menggunakan faktor internal yaitu pada Kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal yaitu peluang (opportunity) dan Ancaman (Threats) seperti berikut:

Tabel Faktor-faktor internal dan eksternal dalam Analisis SWOT

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
	<p>Kekuatan (strength)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mudahnya prosedur dan penyaluran bantuan Adanya sarana dan prasarana yang Mendukung dan memadai 	<p>Peluang (Opportunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> Membantu kebutuhan dasar orang miskin Berkurangnya jumlah orang miskin
	<p>Kelemahan (weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketidakjelasan indikator penentu yang mendapatkan bantuan Berkurangnya jumlah orang miskin 	<p>Ancaman (Threats)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak tepat sasaran Kecemburuan sosial

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020)

Penanggulangan kemiskinan di Kota Batam yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Dimana kondisi ini terkait dengan faktor dalam yaitu pada kekuatan dan kelemahan dari dari suatu instansi tersebut sedangkan faktor dari luar ialah berkaitan dengan dari peluang/kesempatan dari luar instansi dan ancaman yang berasal dari luar instansi. Maka untuk bisa menghasilkan strategi alternatif untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka kedua unsur itu harus dibahas secara rinci untuk mendapatkan strategi. Berikut matriks SWOT yang sudah diidentifikasi sebelumnya:

A. Strategi SO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Strategi pertama yang berasal dari sumber kekuatan dan peluang (strength-opportunities). Dimana kekuatan pada suatu instansi merupakan sebuah kelebihan yang dimiliki oleh instansi atau organisasi. Di sini dikatakan bahwa instansi atau organisasi dapat menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang berasal dari luar instansi. Dimana seperti yang dijelaskan bahwa strategi yang pertama adalah meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan kepada KPM/Penerima bantuan dimana kemudahan dalam penerimaan bantuan sangat membantu program tersebut berjalan

dengan baik sehingga dapat menanggulangi kemiskinan. Strategi yang kedua meningkatkan program bantuan sosial untuk orang miskin dimana memberikan program pengentasan kemiskinan yang bukan sekedar membantu orang miskin tetapi membantu orang miskin tersebut agar tidak miskin kembali yaitu dengan membekali keterampilan atau keahlian agar program pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi membantu orang miskin tetapi memiliki program yang mengubah pola pikir orang miskin tersebut agar tidak terus menerus hidup berada di garis kemiskinan namun bisa beranjak dari hidup miskin.

B. Strategi ST Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Strategi yang berasal persilangan antara (Strength-Threat) kekuatan dan ancaman, dimana ancaman dari luar instansi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat strategi yang pertama yaitu dengan meningkatkan pengawasan atau dengan peninjauan kepada penerima bantuan sosial agar tidak terjadi adanya program bantuan jatuh kepada orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Strategi yang kedua meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang dan memudahkan program bantuan sosial kepada penerima, Misalnya meningkatkan keberfungsian E-warung.

C. Strategi WO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Strategi WO (Weakness-Opportunities) merupakan strategi silang yang berasal kelemahan faktor internal yaitu instansi terkait dengan peluang yang berasal dari luar instansi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun strategi yang pertama ialah dengan meningkatkan indikator dalam menyeleksi siapa saja penerima manfaat bantuan sosial agar program bantuan tepat sasaran. sehingga program bantuan sosial berdampak pada berkurangnya jumlah orang miskin. Kemudian strategi yang kedua meningkatkan jumlah anggaran bantuan sosial dimana bantuan yang diberikan pemerintah maksimal benar-benar cukup dan memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan orang

miskin sehingga benar-benar meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan agar hidupnya beranjak dari kemiskinan

D. Strategi WT Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Strategi WT (Weakness-Threats) merupakan strategi silang antara faktor kelemahan dan faktor ancaman yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Manusia. Adapun strategi yang pertama adalah meningkatkan indikator penerima bantuan dimana harus ada faktor yang jelas dan tegas bahwa yang mendapatkan bantuan sosial adalah orang yang memang benar-benar miskin. Sehingga program bantuan sosial tersebut tepat sasaran atau memang jatuh kepada hak nya sebagai orang miskin. Strategi yang kedua adalah meningkatkan sosialisasi mengenai informasi bantuan sosial untuk orang miskin kepada masyarakat sehingga tidak adanya kecemburuan sosial dimasyarakat

4.3 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Program BPNT dan RTLH

1. Maka dalam Strategi Penanggulangan kemiskinan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdapat beberapa faktor yang menghambat program bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah merupakan salah satu faktor penghambat dalam program Rehab RTLH milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dimana perlu dikaji ulang mengenai anggaran untuk program RTLH ini agar tujuan dari program RTLH ini dalam mengurangi angka kemiskinan di kota batam dapat tercapai.
 - b. Kurang jelas faktor atau kriteria seleksi penerima yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan orang yang menerima bantuan sosial adalah salah satu faktor penghambat dalam program pengentasan kemiskinan, sehingga siapa saja bisa mendapatkan bantuan tersebut yang berakibat ketidaktepatan sasaran yang memperoleh program bantuan sosial tersebut. Dengan adanya hal tersebut dalam menghambat tujuan dari program

- bantuan sosial sehingga kemiskinan justru akan semakin meningkat.
2. Faktor Pendukung Dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah sebagai berikut:
 - a. Prosedur yang mudah untuk mendapat bantuan sosial dari pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung dari program pemerintah, misalnya kelengkapan administrasi yang sangat mudah dan tidak membebani penerima bantuan. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor pendukung yang sehingga program bantuan bisa mendapatkan output yang maksimal.
 - b. Bantuan berbentuk non tunai merupakan salah satu faktor pendukung program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan bisa tercapai. Dimana manfaat dari program bantuan sosial pemerintah dapat dirasakan oleh penerima bantuan, sehingga tidak terjadi adanya bantuan yang dapat digunakan untuk hal yang tidak sama sekali membantu orang miskin. Sehingga program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah orang miskin memang benar adanya.
 - c. Strategi yang berasal dari (Weakness-Opportunities) yaitu meningkatkan mekanisme seleksi penerima manfaat program bantuan sosial dan yang kedua meningkatkan anggaran untuk program bantuan sosial
 - d. Strategi yang berasal dari (Weakness-Threats) yaitu meningkatkan indikator penerima bantuan sosial dan yang kedua meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang bantuan sosial untuk orang miskin
 1. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dari program bantuan sosial Dinsos-PM dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batam yaitu:
 - A. Faktor penghambat pada program bantuan sosial Dinsos-PM dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batam:
 - a. Terbatasnya Anggaran
 - b. Kurang jelas kriteria atau faktor seleksi penerima manfaat bantuan sosial
 - B. Faktor pendukung pada program bantuan sosial yang ada pada Dinsos-PM dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batam:
 - a. Prosedur yang mudah
 - b. Bantuan berbentuk non tunai

Kesimpulan

Setelah menelaah hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh ialah:

1. Berikut analisis SWOT strategi penanggulangan kemiskinan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam:
 - a. Strategi pertama yakni yang bersumber dari (Strength-Opportunities) ialah kemudahan dan efisiensi prosedur administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan hingga ke tangan penerima dan kedua sarana dan prasarana untuk
 - b. Strategi yang berasal dari (Strength-Threats) yaitu yang pertama dalam rangka peningkatan pengawasan pada program bantuan sosial agar tepat sasaran. Yang kedua ialah meningkatkan sarana dan prasarana untuk memudahkan program bantuan sosial kepada orang miskin

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan maka dengan ini peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Pemerintah perlu mengkaji ulang mekanisme seleksi penerima dari manfaat program bantuan BPNT dan RTLH agar yang diekspektasikan pemerintah program dapat tepat sasaran dapat terwujud sehingga program ini bisa berdampak sangat baik yaitu mengurangi jumlah orang miskin.
2. Pemerintah perlu membuat program yang sifatnya untuk mengubah pola pikir orang miskin agar mau berusaha meningkatkan kualitas hidupnya dan keluar dari kemiskinan sehingga anggaran yang diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan tidak sia-sia.
3. Pemerintah harus memiliki strategi berupa bantuan yang sesuai dengan kondisi atau

penyebab kemiskinan di Kota Batam saat ini yaitu miskin yang diakibatkan 4. dan keluarga miskin yang memiliki penghasilan dibawah kelayakan atau di garis kemiskinan.

banyaknya

pengangguran

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Jumlah Penduduk Miskin Kepri.
- BPS kota Batam. (2019). Jumlah Penduduk Kota Batam Bertambah 234.193 Jiwa. Retrieved from <https://batampos.co.id/2019/07/08/jumlah-penduduk-kota-batam-bertambah-234-193-jiwa/>
- BPS kota Batam. (2020). Penduduk Miskin di Batam Ada 66.210 Jiwa. Retrieved from <https://batampos.co.id/2020/01/22/pak-wali-kota-penduduk-miskin-di-batam-ada-66-210-jiwa/>
- khomsan ali, dkk. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklafikasi Orang miskin*. Jakarta.
- Mengulas kemiskinan di desa. (2019).
- Novianto Efri. (2019). *Manajemen Strategis (Pertama)*. Yogyakarta.
- Satibi Iwan, dkk. (2019). STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA TASIKMALAYA. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jispo.v9i2.5550>

LAMPIRAN BUKTI TRANSFER

Status 



Transaksi Berhasil

Nomor Rekening Tujuan	0778899068
Nama Rekening Tujuan	LPPM UNIVERSITAS PUTERA BATAM LEMBAGA
Tanggal Transaksi	27-07-2020
Waktu Transaksi	10:40:54 WIB
Email Penerima	
Bank Tujuan	BNI
Nama Pengirim	DIANA WAHYUNIATI
Nomor Rekening Pengirim	0838132694

Nominal	50.000,00
Fee	0,00
Total	50.000,00

Keterangan

[Kembali ke Menu](#)